

**PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI DI
INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN)**

Nindita Utama, Prof. Dr. Sudarsono SH. MS., Agus Yulianto SH. MH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : utama.fhub@yahoo.com

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pelaksanaan pengawasan Inspektorat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. di daerah kabupaten Pamekasan masih banyak sekali anak-anak yang tidak bersekolah atau tidak mengenyam yang namanya pendidikan. Hal ini disebabkan banyak hal yang membuat mereka tidak mengenyam pendidikan. Salah satunya adalah mahalny biaya pendidikan yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat.

Inspektorat dalam melakukan pengawasan menggunakan 3 (tiga) tahapan, yaitu audit, survey, dan review. Dari ketiga tahapan tersebut, Inspektorat mengalami banyak permasalahan. Salah satunya adalah kurangnya skill dari tenaga administrasi di pihak sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut, Inspektorat dapat mengadakan bimbingan teknis atau *workshop* (pelatihan) untuk meningkatkan skill dari tenaga administrasi di sekolah-sekolah. Serta Inspektorat dapat mengajukan rancangan perundang-undangan yang dapat menjadikannya lebih aktif lagi dalam pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga dapat meningkatkan tingkat keefektifan Inspektorat dalam melakukan pengawasan.

Kata Kunci : pelaksanaan, pengawasan, inspektorat

ABSTRACT

In this paper, the authors raised the issue of supervision of the Inspectorate of the School Operational Funds. The choice of theme background School Operational Funds, which aims to provide free education for poor students and for other students ease so that they acquire basic education services of better quality to finish in order compulsory nine years. The district Pamekasan still a lot of children who do not attend school or get an education that name. This is due to many things that make them an education. One is the high cost of education that can not be reached by the public.

Inspectorate in monitoring using three (3) phases, namely audits, surveys, and reviews. Of the three stages of proficiency level, the Inspectorate experienced many problems. One is the lack of skill of administrative staff in the school. To overcome these problems, the Inspectorate may hold technical guidance or workshops (training) to improve the skills of administrative staff in schools. As well as the Inspectorate may submit draft legislation to make it more actively in the supervision of school operational funds (BOS), thereby increasing the effectiveness of the Inspectorate in conducting surveillance.

Keywords: implementation, supervision, inspectorate

A. LATAR BELAKANG

Tujuan Negara Indonesia salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, bentuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas melalui pendidikan baik formal atau informal demi mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas. Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi setiap anak bangsa. Apabila melihat pada potret anak bangsa saat ini, tidak semua dari mereka bisa mengikuti pendidikan formal atau informal, terhimpitnya ekonomi, atau faktor lingkungan mendorong mereka untuk memilih bekerja diusia mereka yang seharusnya menuntut ilmu.

Pendidikan dasar dan wajib belajar 9 tahun, merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V Pasal 13 ayat (1) ditetapkan bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu“, dan Pasal 11 ayat (1) menyatakan ”pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi“.¹

Implementasi pasca berlakunya Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tersebut, pada tahun 2005 pemerintah mengalokasikan subsidi dana kebidang pendidikan dan salah satunya adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan yaitu “membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun”. Bantuan tersebut diberikan kepada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta yang dikategorikan tidak mampu untuk membiayai sekolahnya. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga diterapkan di Kabupaten Pamekasan sebagai sarana agar anak-anak di Kabupaten Pamekasan dapat mengenyam pendidikan tanpa terkecuali, tetapi dalam penerapannya ada beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu kendala tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Sebagian orang tua berfikir bahwa pendidikan itu tidak begitu penting karena tujuan mereka bersekolah adalah untuk mencari pekerjaan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pamekasan karena terdapat penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disebabkan dana

¹ Wahyu Utomo, **Wajib Belajar 9 Tahun**, (online)
<http://wawaywitzki.blogspot.com/2012/04/wajib-belajar-9-tahun.html>, (21 Mei 2013)

BOS tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang seharusnya dana BOS tersebut dianggarkan untuk membeli buku akan tetapi dipergunakan untuk membangun fasilitas sekolah.

Tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Inspektorat mengalami kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat. Inspektorat seharusnya bisa mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam proses pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah didengungkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul **PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi di Inspektorat Kabupaten Pamekasan).**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Pamekasan?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana upaya atau strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Pamekasan?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Metode penelitian yuridis sosiologis disini dimaksudkan untuk menguji dari segi hukum atau peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Pamekasan, khususnya di Kantor Inspektorat Kabupaten Pamekasan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Penulis memilih Kabupaten Pamekasan karena di daerah Kabupaten Pamekasan masih banyak sekali anak-anak yang tidak bersekolah atau tidak mengenyam yang namanya pendidikan. Hal ini disebabkan banyak hal yang membuat mereka tidak mengenyam pendidikan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden yakni pihak-pihak yang terkait dengan penelitian pelaksanaan pengawasan inspektorat terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan melakukan wawancara (*interview*) di Inspektorat kabupaten Pmekasan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang berupa literatur, penelitian ilmiah, perundang-undangan serta dokumen pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kantor Inspektorat Kabupaten Pamekasan dan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Dan sampel yang akan diteliti adalah Kepala kantor Inspektorat, Sekretaris kantor Inspektorat, dan Seksi bidang pendidikan di kantor Inspektorat Kabupaten Pamekasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik interview yakni dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Kantor Inspektorat Kabupaten Pamekasan selaku Badan Pengawas Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten

Pamekasan selaku instansi yang melaksanakan pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b. Studi Pustaka

Dalam pengumpulan data sekunder, penulis juga memperoleh data dengan literatur dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian, studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Oleh Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat tidak terlepas dari fungsi utamanya yaitu Inspektorat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pamekasan yang melaksanakan kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan yang menjadi obyek pemeriksaan menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu:²

1. Audit

Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang

² Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Alwi, M.Hum., Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan pada tanggal 10 Juni 2013.

seharusnya di bidang keuangan maupun bidang teknis/operasional. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Inspektorat melakukan audit keuangan dan audit investigasi.

Metode ini dinilai cukup efektif oleh inspektorat kabupaten pamekasan karena metode ini adalah langkah awal dari suatu pemeriksaan, dan dari metode ini dapat dilihat apabila terjadi penyimpangan maka inspektorat akan langsung menindak lanjuti laporan tersebut dengan cara **survey**.

2. Survey

Survey dilakukan bersamaan dengan audit. Pemeriksaan atau audit tidak hanya dilihat dari laporan-laporan yang sudah dibuat oleh pihak yang berwenang (sekolah), tetapi diperlukan pula adanya pemeriksaan langsung ke lapangan untuk melihat bahwa laporan yang dibuat tersebut memang benar adanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan agar tujuan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional.

Metode ini dinilai cukup efektif oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan karena dengan metode ini tingkat penyelewengan yang terjadi terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diminimalisir oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan.

3. Review

Review maksudnya adalah laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan diserahkan kepada Inspektorat untuk diperiksa kembali dan kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Inspektorat dapat mengetahui setiap perolehan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di setiap sekolah. Dan dari hasil laporan tersebut Inspektorat Kabupaten Pamekasan dapat mengetahui apakah dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Hal ini dinilai cukup efektif karena dari hasil laporan tersebut Inspektorat dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan yang sudah ada.

Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pengawasan secara Represif dan Prefentif. Pengawasan secara preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Sedangkan pengawasan secara represif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan dan operasional.³

Inspektorat sebagai badan pemeriksa daerah mempunyai konsep tentang pemeriksaan itu sendiri, yaitu memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari pada program selanjutnya.⁴

Kelancaran pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila aparatur pengawas melaksanakan pengawasan dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat dan melakukan pengawasan dengan objektif serta sikap disiplin yang tinggi. Hal ini dilakukan agar aparatur yang bekerja di instansi pemerintahan khususnya Inspektorat Kabupaten Pamekasan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dari inspektorat dengan baik.⁵

Apabila metode yang telah dipaparkan dikaitkan dengan teori *Lawrence M. Friedman*, maka Inspektorat Kabupaten Pamekasan yaitu Inspektorat merupakan sebuah struktur yang berfungsi menggerakkan substansinya yaitu pihak di dalam Inspektorat, pegawainya, maupun diluar Inspektorat, misalnya sekolah yang diawasi, mengingat fungsi dari Inspektorat adalah memeriksa dan mengawasi jalannya setiap subsistem. dalam mengawasi dan memeriksa setiap subsistem Inspektorat tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku yang dapat menjadi pedoman bagi Inspektorat dalam bertindak. Dan hal ini dapat mempengaruhi setiap subsistem yang ada. Misalnya Inspektorat selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan ataupun pengawasan kepada sekolah-sekolah di Kabupaten Pamekasan agar setiap

³ Draft Rencana Strategis 2014-2018 Inspektorat Kabupaten Pamekasan, 2013, Hlm 4.

⁴ Hasil wawancara dengan Dr. Alwi M.Hum, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, 10 juni 2013

⁵ Wawancara dengan Drs. Budi Suprpto, Sekretaris di Kantor Inspektorat Kabupaten Pamekasan pada tanggal 10 juni 2013.

tindakan yang dilakukan bukan semata-mata tindakan sewenang-wenang melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Dan pengawasan inspektorat dapat berjalan dengan baik karena aparatur yang berada didalam Inspektorat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

2. Hambatan-Hambatan yang Dialami Oleh Inspektorat dalam Pelaksanaan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pamekasan mendapati permasalahan-permasalahan, yaitu:

1. Terjadinya tumpang tindih antara Inspektorat Kabupaten Pamekasan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam hal pengawasan
2. Inspektorat bersifat pasif dalam melakukan pemeriksaan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Ada.
4. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tidak Tepat
5. Seringnya Perubahan Regulasi yang Terkait Dengan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
6. Variable pendanaan yang tidak sesuai dengan yang ada dilapangan

3. Upaya atau Strategi yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan Untuk Menyelesaikan Permasalahan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dari permasalahan-permasalahan yang ada diatas, ada beberapa solusi yang dikeluarkan oleh Inspektorat, yaitu:

1. Tumpang tindih antara Inspektorat Kabupaten Pamekasan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal pengawasan dapat diatasi dengan cara Inspektorat Kabupaten Pamekasan membuat rencana ulang terhadap

jadwal pemeriksaan yang bersamaan dengan jadwal pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Pamekasan.

2. Inspektorat Kabupaten Pamekasan yang bersifat pasif dapat mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tugas pemeriksaan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bupati memberikan surat rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Pamekasan untuk ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikarenakan tenaga pengawas yang berada di pusat dan di provinsi terbatas sehingga meminta bantuan kepada Inspektorat kabupaten untuk melakukan pengawasan Khususnya Inspektorat Kabupaten Pamekasan. Surat rekomendasi tersebut menjadi surat tugas kepada Inspektorat Kabupaten Pamekasan untuk melakukan pemeriksaan secara penuh terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setiap tahunnya.
3. Skill Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang dapat diikutsertakan dalam Workshop atau Bimbingan Teknis yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang diusulkan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan untuk menambah wawasan dalam perencanaan anggaran sekolah mereka. Dan cara yang lain yaitu *me-rolling* atau mengganti Sumber Daya Manusia yang tidak paham dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam bidang keuangan dan pengelolaan keuangan sekolah.
4. Penganggaran sekolah yang tidak tepat dapat diatasi dengan cara:
 - a. Rekomendasi
Maksudnya adalah pihak Inspektorat mengajukan rekomendasi anggaran kepada Dinas Pendidikan karena anggaran yang sudah dibuat tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
 - b. Pengubahan Perencanaan Anggaran
Maksudnya adalah Inspektorat sebagai instansi yang mempunyai tugas untuk mengawasi menyarankan agar pihak sekolah merubah perencanaan anggaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan tidak menganggarkan hal yang tidak dibutuhkan. Agar tidak terjadi

pembengkakan atau kelebihan anggaran. Apabila anggaran tersebut lebih dari yang dianggarkan maka pihak sekolah harus menyetorkan anggaran tersebut kepada kas daerah.

c. Peruntukan Anggaran

Dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan prioritas utama yaitu untuk menunjang kegiatan operasional sekolah.⁶

5. Apabila terjadi suatu perubahan regulasi, Inspektorat sebagai instansi pemeriksaan mensosialisasikan perubahan regulasi tersebut kepada Tim Audit. Jika sosialisasi tersebut telah terlaksana tim audit bertugas untuk menyesuaikan aturan pemeriksaan yang sudah dibuat dengan aturan pemeriksaan yang berlaku pada saat ini. Setelah tim audit menyesuaikan aturan yang lama menjadi aturan yang baru, maka tim audit melakukan suatu bimbingan teknis terhadap pihak sekolah. Agar dalam melakukan pemeriksaan pihak sekolah tidak bingung dengan cara atau sistem pemeriksaan inspektorat yang baru.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata sudah cukup efektif. Hal ini dapat dibuktikan dari indikator pengukuran efektifitas hukum. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama sekolah-sekolah yang telah melaksanakan kegiatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, peningkatan

⁶Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, **Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013**, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2012, Hlm 2.

kinerja staff Inspektorat Kabupaten Pamekasan dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semakin optimal.

- b. Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pamekasan mempunyai faktor penghambat dan faktor pendukung, yaitu:

1) Faktor Penghambat

Yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Pamekasan adalah struktur yang diawasi atau yang diperiksa. Karena ada aparatur sekolah yang masih tidak memiliki *skill* (kemampuan) dalam bidang pendanaan dan pembuatan anggaran. Hal ini menjadi faktor penghambat yang mendasar bagi Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2) Faktor Pendukung

Faktor Pendukung yang pertama, yaitu substansi yang menjadi aturan-aturan Inspektorat dalam melakukan pengawasan. Aturan-aturan tersebut antara lain:

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- c) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat.
- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013.

- e) Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Penyelenggaraan Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun Pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2013.

Dan yang kedua, yaitu kultur. Kultur tersebut dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku Inspektorat dalam melakukan pengawasan karena kultur yang diciptakan oleh Inspektorat tidak menimbulkan permasalahan dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- c. Dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Inspektorat Kabupaten Pamekasan memiliki solusi-solusi yang menjadi jalan keluar atau upaya dari setiap permasalahan yang ada. Salah satu solusi atau upaya yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini dirasa cukup efektif karena dari surat rekomendasi yang diberikan oleh Bupati menjadi surat tugas kepada Inspektorat Kabupaten Pamekasan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di Kabupaten Pamekasan.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Disarankan kedepannya Inspektorat Kabupaten Pamekasan dapat mempertahankan tingkat keefektifitasannya dalam melakukan pengawasan dan setiap suborgan di dalam Inspektorat diharapkan tidak ada yang melakukan suatu pelanggaran yang dapat mempengaruhi kinerja dari Inspektorat.
- b. Disarankan kepada Inspektorat terhadap permasalahan yang terjadi pada kurangnya *skill* (kemampuan) dalam pembuatan anggaran dan

pendanaan oleh aparatur sekolah agar diberikan bimbingan teknis atau *workshop* (pelatihan) dengan tujuan kemampuan setiap aparatur sekolah menjadi lebih baik lagi dalam bidang pembuatan anggaran dan pendanaan dan dengan harapan permasalahan tersebut tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya.

- c. Disarankan pula agar Inspektorat mengajukan rancangan peraturan yang dapat menjadikan Inspektorat aktif dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Pamekasan.

DAFTAR PUSTAKA

Draft Rencana Strategis 2014-2018 Inspektorat Kabupaten Pamekasan, 2013

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, **Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013**, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 2012

Wahyu Utomo, **Wajib Belajar 9 Tahun**, (online)
<http://wawaywitzki.blogspot.com/2012/04/wajib-belajar-9-tahun.html>,
 (21 Mei 2013)